



DUTA RIMBA

DARI DAN UNTUK RIMBAWAN BERSAMA MASYARAKAT



**PERHUTANI MENDUKUNG
KETAHANAN PANGAN**

Mendampingi KPH Banyuwangi Utara

Oleh

Juang R. Matangaran

Departemen

Manajemen Hutan

Fakultas Kehutanan

IPB

"Sejak kapan bapak menggunakan helm di petak tebang?" "Dah lamaaaa... Pak!"/ "Kok helmnya masih bersih?"/ "Lha... saya cuci pak!"/ Begitu jawaban spontan membela diri dari seorang penambang yang baru seminggu ini menggunakan alat pelindung diri. "Pak, kok tanaman ini mati, kenapa ya?"/ "Lha... Pak, mandor tanamnya aja bisa mati... pak!"/ Jawaban polos pesangem dengan logat Madura yang kental membuat assessor dan pendamping tertawa. Dipetak tebang dibawah plank "lokasi wajib menggunakan Alat Pelindung Diri" tampak perubahan suasana dampak dari kemajuan pendampingan di KPH Banyuwangi Utara.

Pendampingan oleh lembaga World Wide Fund for Nature (WWF) yang bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan IPB terhadap 5 KPH Perhutani Unit II Jawa Timur yang dimulai pada pertengahan 2006 telah memasuki tahun kedua. Setahun lebih saja mendampingi KPH Banyuwangi Utara dalam rangka membenahi program Manajemen Hutan Lestari (MHL) menuju sertifikasi FSC. Banyaknya gap didalam Baseline Appraisal (BAAP) awalnya cukup membingungkan pokja MHL KPH Banyuwangi Utara dalam pengelompokan berdasarkan bidang produksi, lingkungan dan sosial serta menyusun action plan-nya. Kemajuan terhadap pelaksanaan rencana aksi di awal pendampingan dirasakan sangat lambat dan sedikit terkesan adanya resistensi dari karyawan Perhutani ditingkat KPH terhadap perubahan mendasar yang tadinya hanya melaksanakan pekerjaan rutin kini ditambah dengan MHL. Kurang paham terhadap penyelesaian rencana aksi yang harus mereka kerjakan, teknis monitoring lapangan, mengolah data hasil monitoring, menulis untuk menghasilkan dokumen kajian, serta manfaat langsung bagi karyawan

yang bersangkutan merupakan kendala utama diawal pendampingan. Kesulitan untuk mendeskripsikan dan mengolah data juga menjadi kendala karena umumnya data disajikan dalam format blanko yang kaku. Di pihak lain pekerjaan teknis lapangan umumnya dapat diselesaikan dengan mudah oleh pekerja dan mandor dibandingkan dengan perubahan pola pikir ditingkat manajemen.

Seiring dengan berjalannya waktu, proses pendampingan yang awalnya sulit kini berjalan mulus dan semakin mudah. Karyawan KPH mulai dari pucuk pimpinan sampai tingkat mandor bahkan pekerja lapangan blandong dan pesangem semakin paham tentang MHL sesuai dengan tingkatannya. Dimotori Administrator (ADM), Wakil ADM dan Kasi PSDH, KPH pun tidak pernah surut melaksanakan sosialisasi MHL kepada seluruh stakeholder. Para Asper yang berdedikasi tinggi melaksanakan pekerjaan teknis lapangan sekaligus membina para mandor agar mengerti dan memahami MHL dengan baik. KSS dan Kaur pun sibuk membuat rencana teknis MHL dan melakukan monitoring lingkungan. Pelatihan pun mulai gencar dilaksanakan dalam rangka memenuhi tuntutan MHL sekaligus closing gap dalam BAAP. Stasiun Pemantau Lingkungan dibangun dan monitoring dilaksanakan dengan kontinyu oleh mandor. Identifikasi

flora dan fauna dan monitoring satwa dengan cepat dapat dilaksanakan dengan baik. Identifikasi keberadaan HCVP (*High Conservation Value Forest*) dilakukan dan diketahui terdapat lebih dari 25% dari luas areal KPH Banyuwangi Utara adalah areal yang dapat dimasukkan kedalam HCVE. Semakin tampak motivasi yang besar bagi seluruh karyawan untuk bekerja bersinergi mensukseskan MHL. Dengan cepat data terkumpul dan ditumpuk diruang pokja MHL, tetapi, kemudian apa yang bisa dilakukan dengan data tersebut?

Ternyata mereka belum paham bagaimana cara mengolah data dan mendeskripsikannya dalam laporan. Proses pendampingan yang semakin intens memberikan sentuhan kepada karyawan KPH bahwa merekalah yang berkewajiban menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk tersebut. Dorongan untuk menyelesaikan sendiri pengolahan data maupun dokumen kajian adalah cara terbaik yang dipertimbangkan oleh pendamping sebagai exit strategy jika pendampingan WWF berakhir. Tampaknya kemauan yang kuat mengahankan kapasitas individu yang terbatas. Dengan motivasi yang tinggi, beban tugas MHL akhirnya sebagian besar mulai dapat diselesaikan. Proses internalisasi dan *capacity building* berlangsung dengan baik dan outputnya mulai jelas.

Berwacana dalam tataran konsep MHL seakan mulai terasa bosan dan keinginan untuk fokus pada rencana aksi untuk menghasilkan output dan outcome semakin jelas. Akhirnya KPH mampu menyusun sendiri beberapa dokumen kajian diantaranya adalah kajian kelestarian produksi, kajian keamanan, kajian limbah pemanenan, kajian HCVE, kajian finansial, dan SMK3. Meskipun masih perlu penyempurnaan namun kemauan untuk berbuatlah yang menyebabkan mereka mampu menghasilkan dokumen kajian. Kritik terhadap dokumen output bahwa itu hanya tampilan kulit luar saja dapat dijawab dengan pema-

haman yang baik atas kajian tersebut dan dibuktikan dengan mampu menjawab dengan lugas, tegas, dan benar terhadap semua pertanyaan assessor saat pre-assessment.

Setelah setahun pendampingan, WWF mengadakan *annual audit* untuk melihat kemajuan MHL di KPH Banyuwangi Utara. *Annual audit* dilakukan oleh auditor WWF maupun oleh pendamping WWF. *Persentase closing gap* menurut pendamping WWF setelah satu setengah tahun pendampingan dapat dilihat dalam Tabel 1. Perubahan warna terjadi sebanyak 65% yang menunjukkan kemajuan *closing gap* yang terjadi di KPH Banyuwangi Utara. Tersisa sekitar 35% gap yang masih dalam proses penyelesaian. Gap yang tersisa tersebut sebagian besar adalah kajian lingkungan yang belum selesai meskipun data monitoring dan data yang diperlukan untuk kajian tersebut sudah lengkap.

ara lain adalah konflik tenurial Dusun Pringgondani, konflik regulasi pengelolaan kawasan penyangga BH Bitakol, CoC kayu dan CoC getah pinus, *safety* pada chainsaw, dan HCVP.

Konflik tenurial Pringgondani

Dari informasi lisan, dokumen, dan laporan hasil identifikasi enclosure oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jatim tahun 2006 diketahui bahwa masyarakat telah bermukim di dusun tersebut sejak 1942. Mereka ditempatkan oleh tentara Jepang untuk membuka hutan sebagai lumbung pangan. Awalnya hanya sebanyak 15 KK sekarang terdapat 1395 jiwa dalam 365 KK. Luas kawasan hutan yang ditempati adalah 275 ha, kondisi rumah umumnya permanen, terdapat pula bangunan Sekolah Dasar dan Puskesmas. Masyarakat tetap mengakui tanah tersebut adalah kawasan hutan Perhutani tetapi mereka tidak mau pin-

Tabel 1. HASIL ANNUAL AUDIT* oleh Pendamping WWF

TERHADAP KEMAJUAN PROSES SERTIFIKASI MHL KPH BANYUWANGI UTARA

URAIAN	Baseline Appraisal			PERUBAHAN WARNA (selama MHL)						Gap yang tersisa		
	Berah	Kuning	TOTAL	Berah ke Kuning	Kuning ke Hijau	Berah ke Hijau	Berah ke Merah	Kuning ke Kuning	Berah	Kuning	TOTAL	
LEGALITAS	9	17	26	7	7	1	2	10	2	10	12	
PROSAKSI	15	35	50	14	13	2	1	24	1	24	25	
LINGKUNGAN	27	7	44	17	3	11	4	4	4	4	8	
SOSIAL	37	7	44	9	3	20	6	4	6	4	12	
Total	98	66	164	47	26	34	15	42	15	40	57	
Persentase	98,7%	40,2%	100%	28,2%	21,2%	20,7%	8,1%	24,4%	24,3%	21,7%	100%	
Persentase warna berubah											65%	
Persentase warna tetap (gap yang tersisa)											35%	

*Audit Oktober 2007

Setelah satu setengah tahun melakukan persiapan sertifikasi MHL maka pada bulan Februari 2008 dilakukan pre-assessment oleh assessor SGS. Hasil pre-assessment, setiap Prinsip FSC terdapat *shortfalls* yang berpotensi menjadi major maupun minor CAR. Selain kajian lingkungan dan kajian dampak sosial yang masih dalam proses penyusunan, beberapa catatan penting yang berpotensi major CAR ant-

dah, namun mereka bersedia tukar menukar lahan meskipun dengan cara membeli. Hubungan dengan Perhutani cukup baik dan *sharing* PHBM terbesar se-KPH Banyuwangi Utara juga terdapat pada LMDH Wana Lestari pada dusun tersebut. Upaya kearah penyelesaian sedang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemda setempat. Seiring proses penyelesaian konflik yang sedang berlangsung, dapat di-

lakukan pula perubahan kelas hutan yang semula TK menjadi kelas hutan lainnya.

Pengelolaan Kawasan Penyangga Bitakol

Bagian Hutan (BH) Bitakol seluas 5612 hektar terdiri dari hutan jati dengan sebaran kelas umur I sampai VII seluas sekitar 2400 hektar sisanya adalah TK,TKL dll seluas sekitar 3200 hektar. Menurut SK Menhut No.417/Kpts-II/1999 yang menyatakan bahwa zona penyangga Taman Nasional Baluran BH Bitakol berada di luar kawasan TN tersebut. Kemudian muncul Surat Menhut No.411/Menhut-IV/2006 yang meminta Baplan melakukan penataan batas temu gelang dengan memasukkan kawasan penyangga seluas 5612 ha menjadi bagian Taman Nasional Baluran dan segera memproses keputusan Menhut tentang penetapannya. Didalam surat tersebut juga tercantum pengelolaan kolaboratif antara Perhutani dan TN Baluran. Perlu policy dan rumusan yang jelas dari Perhutani (Direksi) tentang pengelolaan kolaboratif BH Bitakol ini mengingat perlunya pertimbangan aspek konservasi pada kawasan ini yang merupakan tempat banteng mencari sumber air minum pada saat kemarau.

CoC kayu jati

Tanpa perlu menggunakan sistem barcode yang mahal, tetapi dengan membuat beberapa penyempurnaan dalam penandaan fisik dan dokumen tata usaha kayu yang digunakan sekarang maka penelusuran kayu dari TPK sampai ke tunggakpun dapat dilakukan. Lacak balak dengan mudah dapat dilakukan jika penandaan fisik kayu dan dokumen dapat ditelusuri karena terdapat kaitan satu dengan lainnya. Penelusuran dokumen dari TPK sampai ke petak diperlukan identitas nomor pohon. Nomor pohon tidak terdapat dalam blanko DK 308, DK 304, DK 301. Kolom nomor pohon hanya terdapat pada buku takssasi kayu blanko DK 316. Format blanko dokumen perlu disempurnakan dan hal ini merupakan kewajiban unit. Diperlukan for-

mat blanko dokumen kayu yang baru dan diujicobakan terlebih dahulu pada KPH Banyuwangi Utara dan Madiun.

CoC getah pinus

Dalam standar sertifikasi FSC, *new timber forest products* dalam unit manajemen merupakan bagian yang disertifikasi. Asesor menyatakan bahwa produk getah pinus yang dihasilkan KPH Banyuwangi Utara mutlak turut disertifikasi. Hal ini dimungkinkan dengan membuat sistem lacak getah pinus. Sistem ini dibuat sedemikian rupa dengan membuat kaitan antar dokumen pergerakan getah, penandaan fisik pada wadah getah, sistem kontrol volume getah pinus dari KPH yang masuk ke industri pengolahan getah. Proses CoC getah di dalam industri pengolahan getah pinus merupakan CoC tersendiri dan tidak perlu dimasukkan dalam skenario lacak getah di KPH.

Safety pada chainsaw

Di Perhutani umumnya operator chainsaw mengoperasikan chainsawnya dalam kondisi rantai yang kendor. Mereka menganggap hal tersebut benar dan takut mengencangkan rantai chainsawnya karena khawatir rantai putus. Kesani ini tertangkap oleh asesor bahwa Perhutani tidak memberikan pelatihan terhadap teknik penggunaan chainsaw meskipun perhutani rutin mengadakan pelatihan tebang. Chainsaw yang digunakan juga sangat berpotensi untuk terjadinya kecelakaan kerja karena chainsaw tersebut tidak dilengkapi perangkat safety yang cukup.

HCVF

KPH Banyuwangi Utara beruntung karena lebih dari 25% kawasan hutannya masih terdapat hutan alam dengan kondisi yang baik. Didalamnya terdapat beberapa jenis satwa dalam kategori CITES appendix 1 dan 2 serta terdapat areal hutan yang merupakan sumber air yang dialirkan ke beberapa desa untuk kepentingan air minum ratusan keluarga di desa tersebut. Draft kajian HCVF perlu disempurnakan dengan melakukan konsultasi er-

pert dan stakeholder. Kondisi areal HCVF dilapangan menunjukkan hutannya masih berupa hutan alam tetapi kelas hutannya dimasukkan dalam kelompok hutan produksi TBPTH. Diperlukan suatu kepastian bagi asesor bahwa hutan alam tersebut tidak akan dikonversi menjadi hutan produksi. Perubahan kelas hutan TBPTH untuk kasus HCVF ini perlu dirumuskan secara serius oleh Biro Perencanaan Perhutani.

Shortfalls lainnya

Penyelesaian kajian dampak lingkungan termasuk UKL dan UPL, pembuatan kajian dampak sosial, road map partial certification, ringkasan publik untuk manajemen plan tahunan dan hasil monitoring tahunan, pelatihan K3 terjadwal, penanganan jenis invasif *Acacia selotica*, upah di permukiman pinus, penanganan stimulasi getah pinus, penjelasan distribusi kelas umur jati dan umur tebang minimum, serta penganggulangan kebakaran dan hama penyakit. Selain hal tersebut cukup penting mempersiapkan informasi spasial dengan membuat peta-peta tematik yang lebih lengkap dan dapat memberikan informasi secara cepat dan informatif. Hal lainnya, website perlu disempurnakan dengan menambahkan public summary.

Tentu bukan hal mudah untuk mencapai kinerja MHL yang sempurna sesuai Prinsip dan Kriteria FSC mengingat banyaknya shortfalls tersebut. Namun kerja keras KPH dan perhatian penuh unit, Biro terkait juga direksi menjadi kunci keberhasilan MHL. Perubahan jangan hanya nyata terjadi ditandatangani tetapi pola pikir juga harus berubah sampai ke tingkat unit dan direksi. Harapan KPH Banyuwangi Utara mendapat sertifikat MHL berpeluang cukup besar mengingat sumberdaya hutannya masih baik, konflik tenurial relatif kecil, ditambah lagi "anugerah" sumber daya manusia di KPH Banyuwangi Utara memiliki semangat perubahan yang tinggi, serta didukung oleh "Pak ADM" yang sudah dua tahun menjabat dan masih setia di Banyuwangi. ■